



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BASIS DATA TERPADU UNTUK PROGRAM BANTUAN SOSIAL

DEPUTI SESWAPRES BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN/ SEKRETARIS EKSEKUTIF TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN (TNP2K)

BAHAN RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN DPR RI

12 Juni 2013

PROSES PENGEMBANGAN BASIS DATA TERPADU

PERBAIKAN METODE PENGUMPULAN DATA PPLS 2011

Tujuan: menurunkan *inclusion*
dan *exclusion error*

	Miskin	Tidak Miskin
Menerima Bantuan	<input checked="" type="checkbox"/>	x <i>Inclusion Error</i>
Tidak Menerima Bantuan	x <i>Exclusion Error</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Penyusunan Daftar Awal Rumah Tangga



PROSES PENGEMBANGAN BASIS DATA TERPADU

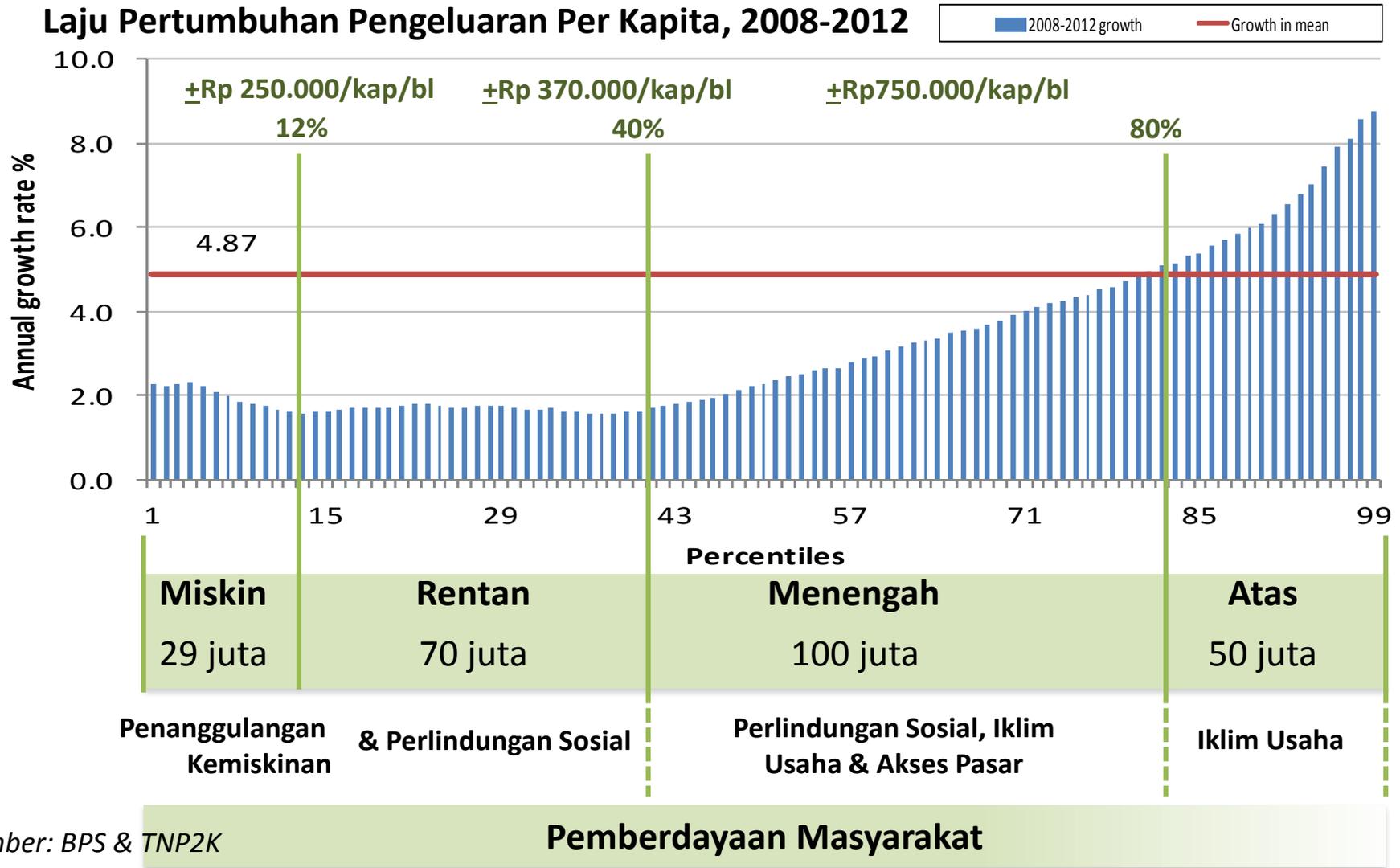


Perbaiki Metodologi:

- Rumah tangga yang disurvei lebih banyak (45% vs. 29% pada tahun 2008)
- Penggunaan Sensus Penduduk sebagai starting point
- Pelibatan Komunitas Miskin
- Variabel yang dikumpulkan lebih banyak → Prediksi rumah tangga miskin lebih baik
- Perbaiki metode Proxy Mean Testing (PMT)

EMPAT KELOMPOK PENDUDUK dengan kebutuhan yang berbeda

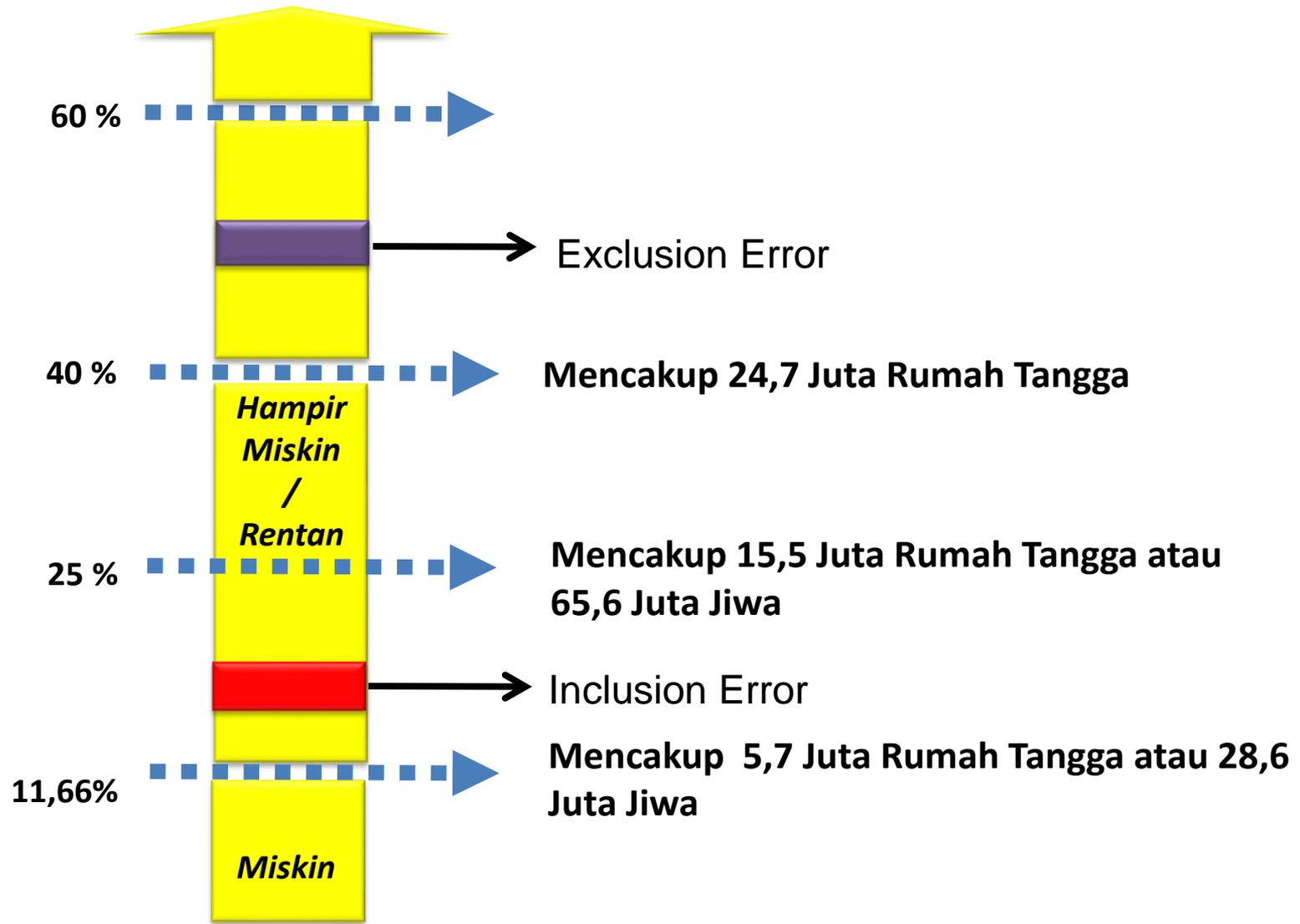
Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita, 2008-2012



Sumber: BPS & TNP2K

Pemberdayaan Masyarakat

PERSENTASE PENDUDUK DENGAN KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI YANG HAMPIR SAMA



PENGELUARAN RATA-RATA PADA PERCENTILES 25

Propinsi	Jumlah Rumah Tangga	Rata-Rata Jumlah Anggota RT	Pengeluaran Rata-Rata Rp/Perkapita/Bulan	Pengeluaran RT/bulan	Upah Minimum Tahun 2012
Aceh	356,720	4.9	407,654	2,007,231	
Sumatera Utara	746,220	5.1	327,238	1,658,148	1,200,000
Sumatera Barat	275,431	4.8	384,033	1,856,727	1,150,000
Riau	227,656	5.8	420,964	2,432,675	1,238,000
Jambi	162,779	4.7	369,108	1,732,017	1,142,500
Sumatera Selatan	419,579	4.3	306,891	1,327,721	1,195,220
Bengkulu	121,574	4.3	321,077	1,394,543	930,000
Lampung	573,954	4.1	323,567	1,340,797	
Bangka Belitung	41,635	5.8	421,876	2,462,022	1,110,000
Kepulauan Riau	64,732	4.8	468,218	2,251,389	
DKI Jakarta	226,462	3.4	502,335	1,721,472	1,529,150

PENGELUARAN RATA-RATA PADA PERCENTILES 25

Propinsi	Jumlah Rumah Tangga	Rata-Rata Jumlah Anggota RT	Pengeluaran Rata-Rata Rp/Perkapita/Bulan	Pengeluaran RT/bulan	Upah Minimum Tahun 2012
Jawa Barat	2,615,790	3.9	290,242	1,118,233	
Jawa Tengah	2,482,157	3.8	261,794	986,387	
Di Yogya	288,391	3.7	312,424	1,146,131	892,660
Jawa Timur	2,857,469	3.7	282,203	1,035,106	
Banten	526,178	4.5	307,611	1,387,387	1,042,000
Bali	151,924	4.2	320,311	1,339,272	967,500
Nusa Tenggara Barat	471,566	3.8	273,496	1,031,135	1,000,000
Nusa Tenggara Timur	421,799	4.9	312,068	1,529,751	925,000
Kalimantan Barat	233,922	4.8	307,041	1,478,369	
Kalimantan Tengah	83,711	4.2	369,512	1,557,907	1,327,459
Kalimantan Timur	161,592	4.7	351,274	1,652,730	1,177,000

PENGELUARAN RATA-RATA PADA PERCENTILES 25

Propinsi	Jumlah Rumah Tangga	Rata-Rata Jumlah Anggota RT	Pengeluaran Rata-Rata Rp/Perkapita/Bulan	Pengeluaran RT/bulan	Upah Minimum Tahun 2012
Kalimantan Selatan	147,718	5.2	482,491	2,491,395	1,225,000
Sulawesi Utara	161,089	4.7	327,522	1,523,947	1,250,000
Sulawesi Tengah	201,239	4.7	326,300	1,542,091	885,000
Sulawesi Selatan	484,617	4.5	257,591	1,149,533	1,200,000
Sulawesi Tenggara	158,716	4.2	297,324	1,256,949	1,032,300
Gorontalo	89,918	4.6	301,266	1,376,153	837,500
Sulawesi Barat	75,453	5.1	240,211	1,220,668	
Maluku	119,825	5.3	335,572	1,766,303	975,000
Maluku Utara	55,531	6.0	417,497	2,495,597	960,498
Papua Barat	90,547	5.4	541,815	2,899,545	1,450,000
Papua	435,003	4.3	473,571	2,049,672	
INDONESIA	15,530,897	4.1	352,791	1,449,601	

PEMBATASAN AKSES PUBLIK PADA BDT

- Pembatasan akses publik pada BDT dilindungi:
 - **UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU:** apabila dibuka kepada Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang (terkait kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga dan anggotanya).
 - **UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan:** data perseorangan harus disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Jika mendistribusikan maka dapat dikenakan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 10.000.000.000,-
- Putusan Majelis Komisioner KIP dalam Sengketa Informasi Publik antara TNP2K vs Perkumpulan Inisiatif (LSM):
 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruh data BDT dengan nama dan alamat
 2. Informasi yang diminta oleh Pemohon termasuk informasi yang bersifat tertutup tidak dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik (dikecualikan)
 3. TNP2K diperintahkan untuk tidak memberikan data/informasi yang diminta oleh pihak Pemohon

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (PASAL 17) TERDIRI DARI :

1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. Informasi Publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi Publik yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 - a. Informasi Publik yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - b. Informasi Publik yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - c. Informasi Publik yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - d. Informasi Publik yang mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - e. Informasi Publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi,**
4. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
5. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU.

TERIMA KASIH